



## BAB II

### Telaah Pustaka dan Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Pengantar

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari setiap variabel, kerangka pemikiran yang merupakan gabungan dari berbagai hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab batasan masalah. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai rumusan hipotesis yang akan diajukan.

#### 1. Tinjauan Teori Penelitian

##### a. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor yang strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Legitimasi merupakan keadaan psikologi keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2011:87) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam.

Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perubahan dan perkembangan lingkungan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat di mana perusahaan berada. Perusahaan nilai dan norm social dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan.

Gray et. Al dalam Nor Hadi (2011: 88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemeritahan individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Ketika ada perbedaaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Wattrick dan Mahon (1994) dalam Nor Hadi (2011:90) menyatakan bahwa legitimasi gap dapat terjadi karena beberapa faktor:

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan kearah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Stakeholder Theory

Ⓒ Pertanggungjawaban sosial perusahaan terkait erat hubungannya dengan *Stakeholder theory*. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya berorientasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat terhadap *stakeholdernya* yang meliputi; pemegang saham, kreditor, supplier, pemerintah, masyarakat. Greenley dan Foxall dalam Nor Hadi (2011:103) menyatakan bahwa terkait keberadaan perusahaan yang tak dapat terpisahkan dengan keberadaan stakeholder, serta daya dukungnya terhadap upaya meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial perusahaan, terhadap empat klasifikasi stakeholder, yaitu:

1. *Customer orientation*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan seharusnya menjalin hubungan dengan para konsumennya. Hal itu dipandang sangat penting karena *going-concern* (keberlanjutan atau hancurnya) perusahaan sangat tergantung pada komitmen dan legitimasi konsumen dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
2. *Competitor orientation*, berkaitan dengan tipologi *dis-competitive advantage* perusahaan terhadap kompetitornya. Hal ini, muncul sebagai upaya menjaga *competitive advantage*, di mana seharusnya perusahaan tertutup orientasi strategi terhadap kompetitornya, karena hal itu dapat melemahkan posisinya. Perusahaan seharusnya memiliki strategi diatas kompetitornya terkait dengan penciptaan pelanggan setia.
3. *Employee orientation*, terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan memperhatikan kepentingan karyawan dan meningkatkan kepuasan kebutuhannya. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap karyawan, mereka selalu berusaha meningkatkan keterbukaan, menciptakan rasa aman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam pekerjaan dan meningkatkan kepuasan kinerja. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja baik secara individual maupun kelompok.

4. *Stakeholder orientation*, terkait dengan bagaimana manajemen menjaga keterbukaan dengan kepentingan shareholder. Legitimasi *shareholder* dapat ditingkatkan dengan cara menjaga kepentingan *shareholder* dalam perusahaan, seperti: upaya menciptakan rasa aman dalam berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan shareholders.

Kasali Rheinald dalam Nor Hadi (2011:104) membagi stakeholders, menjadi:

1. *Stakeholders* internal dan stakeholder external. Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada didalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan. Manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada diluar lingkungan organisasi, seperti: penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah,pers, kelompok investor,dll.
2. *Stakeholder* primer, stakeholder sekunder dan stakeholder marjinal. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang harus diperhatikan oleh perusahaan, dan stakeholder sekunder merupakan stakeholder kurang penting, sedangkan stakeholder marjinal merupakan stakeholder sering diabaikan oleh perusahaan.
3. *Stakeholder* traditional dan stakeholder masa depan. Karyawan dan konsumen merupakan stakeholder traditional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholder masa depan adalah stakeholder pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruh pada organisasi, seperti peneliti, konsumen potensial, calon investor, dll.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. *Prononents, opponents, dan uncommitted.* Stakeholder proponents merupakan stakeholder yang berpihak pada perusahaan, stakeholder opponents merupakan stakeholder yang tak memihak perusahaan, sedangkan stakeholder uncommitted adalah stakeholder yang tak peduli lagi pada perusahaan.
5. *Silent majority* dan *vocal minority*. Dilihat aktivitas stakeholder dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara aktif, namun ada pula secara pasif.

c. **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Menurut Michael C. Jensen dan W. H. Meckling (1976) dalam Amanita Novi Yushita (2010:57), ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*), dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Sedangkan *positive accounting theory* secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen (*bonus plan hypothesis*), kreditur dengan manajemen (*debt/equity hypothesis*), dan pemerintah dengan manajemen (*political cost hypothesis*).

Teori keagenan dapat dipandang sebagai model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

William R. Scott (2000) dalam Amanita Novi Yushita (2010:57), menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya, dimana antara *agent* dan *principal* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kedua jenis kontrak ini sering kali dibuat berdasarkan angka laba bersih, oleh karena itu kontrak tersebut mempunyai implikasi terhadap akuntansi.

Manajemen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal*, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, *principal* sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non-finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh *principal* untuk memberikan insentif pada *agent*. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko. *Agent*, yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi akses pada informasi internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya. Keinginan *principal* tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi dan sebagainya.

*Agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal*, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utilitynya*. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Masalah keagenan (*agency problem*) sebenarnya muncul ketika principal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan *principal* dan *agent* adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan. Dalam akuntansi laba (biaya) yang sudah menjadi hak (kewajiban) dalam periode sekarang, belum diterima (dibayarkan) secara tunai, maka angka-angka dalam laporan keuangan mengandung komponen akrual. Komponen ini berada di bawah kebijakan manajemen (*discretionary*) maupun tidak (*non discretionary*) (Slamet Sugiri, 1998 dalam Amanita Novi Yushita, 2010:58). Adanya kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*) dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, ditambah motif-motif tertentu, kemungkinan pihak manajemen memanfaatkan pos-pos akrual guna menyajikan laba yang sesuai dengan kepentingannya, yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, seperti pemilik, pemegang saham, atau pemberi pinjaman.

Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kekurangannya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 2. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### **Ⓒ Definisi Pengungkapan**

Dalam Suwardjono (2010:578) Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2010:578) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

*"Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements."*

"Pengungkapan berarti menyediakan informasi dalam laporan keuangan, yang meliputi laporan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan tambahan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal."

### **b. Fungsi atau Tujuan Pengungkapan**

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Karena pasar modal merupakan sarana untuk pemenuhan dan dari masyarakat, pengungkapan dapat wajib untuk (suwarjono 2010:580)

#### **(1) Tujuan melindungi**

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup cangguh sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu pos statemen keuangan. Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat pengungkapan akan menjadi tinggi.

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**(2) Tujuan informatif**

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakainya.

**(3) Tujuan kebutuhan khusus**

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada bahan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

**c. Tingkat-Tingkat Pengungkapan**

Suwarjono (2005: 581) berpendapat bahwa pada umumnya ada tiga tingkatan, yaitu:

1) *Adequate disclosure* (Pengungkapan yang memadai)

*Adequate disclosure* merupakan pengungkapan informasi minimal yang harus ada sehingga iktisar-iktisar keuangan tidak menyesatkan dan dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan. Pengungkapan yang memadai inilah yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan.

2) *Fair disclosure* (Pengungkapan yang wajar)

*Fair disclosure* tersirat tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengungkapan wajar ini terdiri dari pengungkapan wajib (adequate disclosure) ditambah dengan informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan.

3) *Full disclosure* (Pengungkapan yang penuh)

*Full disclosure* menyangkut kelengkapan penyajian semua informasi. Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi nonkeuangan. Penyajian informasi didalam laporan keuangan yang lengkap berarti informasi tersebut disajikan menyeluruh, dimana didalamnya terdapat *voluntary disclosure*.

d. **Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela**

Ada dua jenis pengungkapan menurut Suwarjono (2005:583), yaitu:

1) Pengungkapan sukarela (*vountary disclosure*)

Pengungkapan sukarela dapat dikatakan juga sebagai informasi yang dapat disediakan oleh manajemen tetapi tidak diwajibkan untuk diungkapkan karena merupakan kebiasaan oleh manajemen untuk mengungkapkannya. Atau pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Dalam rerangka konseptual FASB yang termasuk tingkat pengungkapan wajib adalah statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan, dan informasi pelengkap.

2) Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi san badan pengawas. Dalam rerangka konseptual FASB yang



termasuk tingkat pengungkapan wajib adalah statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan, dan informasi pelengkapan.

#### e. Metode Pengungkapan

Pengungkapan akan melibatkan seluruh proses pelaporan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengungkapan, dan pemilihan metode ini tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan suwarjono (2005:591) antara lain:

##### 1) Pos statemen keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statemen keuangan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan sesuai dengan standar dengan definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian (jenis statemen, format statemen, klasifikasi pos, dan susunan pos). Jenis statemen meliputi neraca, statemen laba rugi, dan statemen perubahan ekuitas, dan statemen aliran kas.

##### 2) Catatan kaki (catatan atas statemen keuangan)

Catatan kaki (*footnotes*) atau catatan atas statemen keuangan (*notes to financial statements*) merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau element statemen keuangan. Catatan atas statemen keuangan menjadi bagian integral dari statemen keuangan secara keseluruhan.

##### 3) Penggunaan istilah teknis (terminologi)

Istilah teknis dan strategik merupakan bagian dari pengungkapan. Oleh



karena itu, istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, element, judul (*captions*), atau subjudul. Nama elemen merupakan hal yang sangat strategis karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Penyusun standar banyak menciptakan istilah-istilah teknis untuk merepresentasi suatu realita atau makna dalam akuntansi.

4) Penjelasan dalam kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi, dan acuan (misalnya skedul) merupakan informasi dapat disajikan dalam tanda kurung.

5) Lampiran

Rincian, statemen tambahan (*supplementary statements*), daftar rincian (skedul), atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seleksi lain yang terpisah dengan statemen utama.

6) Penjelasan auditor dalam laporan auditor

Pada dasarnya, auditor tidak perlu lagi mengungkapkan pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan PABU karena secara otomatis akan terefleksi dalam statemen keuangan. Jika ada syarat-syarat penerbitan laporan auditor standar yang tidak dipenuhi dan menunjukkan pengaruhnya terhadap kewajaran statemen keuangan secara keseluruhan maka auditor harus menjelaskan dalam laporan auditor keadaan-keadaan yang menyebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut.

7) Komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau nonfinansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai statemen melalui berbagai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara. Wawancara manajer dengan wartawan (jumpa pers atau *press release*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Statemen keuangan merupakan representasi manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah pihak yang paling tahu tentang apa yang terjadi dibalik apa yang disampaikan melalui statemen keuangan. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat kepada pemegang saham (*letter to shareholders*), laporan dewan komisaris (*report of board of commissioners*), laporan direksi (*report of board of directors*), dan diskusi dan analisis manajemen/DAM (*management's discussion and analysis/MDA*).

### 3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### a. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut pandangan Friedman dalam Bertens (2000:292) tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal: kepada diri sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya. Jika berbicara tentang tanggung jawab sosial, yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan di sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility / CSR*) dalam Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek



operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Menurut *The World Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

#### **b. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Bradshaw dalam Harapan (2008: 400-401) mengemukakan 3 bentuk tanggung jawab sosial perusahaan:

##### 1) Sumbangan Perusahaan (*corporate philanthropy*)

Tanggung jawab perusahaan terbatas pada kedermawanan atau kerelaan saja belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung.

##### 2) Tanggung Jawab Perusahaan (*corporate responsibility*)

Kegiatan pertanggung jawab sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan Undang-Undang atau bagian dari kesediaan atau kemauan perusahaan.

##### 3) Kebijakan Perusahaan (*corporate policy*)

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tanggung jawab perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakan.

## **4. Global Reporting Initiative**

### **a. Sejarah Global Reporting initiative**

*Global Reporting Initiative* (GRI) disusun pertama kali pada tahun 1997 oleh *Coalition on Environmentally Responsible Economies* (CERES) sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat. GRI memiliki visi bahwa pengungkapan tentang ekonomi, lingkungan, sosial dan kinerja adalah sebagai kebiasaan dan berimbang dalam laporan keuangan, dan hal penting untuk kesuksesan organisasi. Misi GRI adalah menciptakan kondisi yang transparan dan dapat diandalkan serta kesinambungan dalam pertukaran informasi melalui pengembangan dan perbaikan yang terus melalui *GRI Sustainability Reporting Framework*. GRI memasuki kriteria kerangka laporan dalam semua aspek perkembangan perusahaan sebagai sarana internal untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan *sustainability* perusahaan dan strategi yang digunakan, serta kegiatan aktual lainnya.

Tahun 1999 GRI mengeluarkan *Sustainability Reporting Guidelines* sebagai *draft* pembuka atas kerangka pelaporan yang kemudian direvisi pada tahun 2002 yang dikenal sebagai kerangka CSR Eropa yang menjadi standar lokal dan memperoleh dukungan bisnis, pemerintah, dan komunitas masyarakat. *G3 Guidelines* yang kemudian muncul pada Oktober 2006 dikeluarkan GRI sebagai panduan untuk memberikan pelaporan kinerja yang berkelanjutan. *Sustainability Reporting* atau pelaporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan mempertanggung jawabkan kepada internal dan eksternal *stakeholders* atas kinerja organisasi menuju

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





kepada pengembangan berkelanjutan. Penggunaan GRI sebagai standar panduan dalam pelaporan berkelanjutan paling banyak digunakan diseluruh dunia karena pembuatannya berdasarkan consensus dari perwakilan masyarakat sipil, tenaga kerja, investor, pemerintah, dan *stakeholders* lainnya.

### Prinsip-prinsip Pelaporan

Dalam G3 *Guidelines* (2006:13) dijelaskan prinsip-prinsip pelaporan untuk memastikan kualitas pelaporan yang memungkinkan *stakeholder* untuk dapat membuat penilaian atas kinerja dan melakukan tindakan. Prinsip-prinsip pelaporan tersebut adalah:

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip yang menekankan pada pusat pertanggungjawaban (akuntabilitas). Transparansi menuntut bahwa tanpa melihat format dan isi laporan, dan asumsi yang terdapat dalam informasi yang dilaporkan. Penting bahwa organisasi pelapor memiliki transparansi mengenai proses, prosedur, dan asumsi yang mendasari laporan mereka sehingga pengguna dapat yakin dan menginterpretasikan informasi yang dilaporkan. Maka dapat dikatakan bahwa transparansi melebihi prinsip apapun tetapi mempengaruhi semua prinsip.

#### 2. Menyeluruh (*Inclusiveness*)

Prinsip *inclusiveness* berpijak pada ide bahwa pandangan *stakeholders* adalah bagian yang integral dari suatu laporan yang berarti dan harus dilakukan selama proses mendesain laporan. Organisasi pelaporan harus mau melibatkan *stakeholders* yang berpengaruh baik langsung ataupun tidak langsung. Prinsip *inclusiveness* juga menjawab kebutuhan *stakeholders* yang

## © Hak cipta milik IBI TKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI TKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI TKKG.



beragam yang menggunakan laporan berkelanjutan. Rentan pemakai laporan berkelanjutan lebih luas daripada laporan keuangan. *Inclusiviness* berperan penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan isinya mencerminkan kebutuhan pengguna yang beragam.

### 3. Audibilitas (*Audibility*)

Prinsip audibilitas mengacu pada perluasan sistem informasi manajemen dan praktika komunikasi yang kemudian dikaji keakuratannya oleh pihak internal dan eksternal. Dalam menyiapkan laporan, organisasi harus tetap menanyakan pertanyaan. Apakah repon terhadap pertanyaan disajikan sedemikian rupa sehingga pihak internal dan eksternal bisa menguji keakuratannya, kelengkapan, konsistensi, dan reliabilitasnya? Pernyataan yang tidak bisa didiversifikasi atau data yang mempengaruhi pesan yang luas yang terhadap dalam laporan yang menggunakan panduan bisa memberi kredibilitasnya. Sebagai tambahan untuk akurasi dan kredibilitas, kelengkapan informasi bisa mempengaruhi kemampuan auditor dalam memberikan penilaian.

### 4. Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip ini mengacu pada akuntansi dan pengungkapan, dalam rincian yang cukup, semua informasi yang menjadi kepedulian *stakeholders* dalam batasan-batasan laporan yang diberikan (yakni lingkup, batasan, dan waktu). Penjelasan apakah informasi tersebut memenuhi uji signifikansi bagi *stakeholders* seperti halnya pertimbangan sosial yang berbasis luas yang mungkin tidak muncul dalam proses konsultasi *stakeholders*.

### 5. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi adalah derajat kepentingan yang diberikan pada suatu aspek

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertentu, indikator, atau sepotong informasi, dan melambangkan aspek kecukupan dimana informasi menjadi penting untuk dilaporkan. Relevansi dalam laporan berkelanjutan didorong oleh hubungan yang signifikan dengan potongan informasi untuk memberitahu pengguna proses pengambilan keputusan. Signifikansi informasi bisa dinilai dari sejumlah perspektif, namun dalam sistem pelaporan apapun, perspektif kunci adalah pengguna informasi. Laporan harus memberikan penekanan yang kuat terhadap kebutuhan spesifik pengguna.

Dalam mempertimbangkan relevansi, penting agar sensitif terhadap perbedaan mengenai bagaimana pengguna dan organisasi pelapor menggunakan informasi. Melalui konsultasi *stakeholder*, organisasi pelaporan bisa memahami lebih baik kebutuhan informasi *stakeholders* dan bagaimana cara terbaik untuk meresponnya. Idealnya, laporan bagi organisasi pelapor maupun pengguna. Namun dalam beberapa hal, informasi yang relevan bagi pengguna laporan bisa saja tidak memiliki nilai yang sama bagi organisasi pelapor. Sehingga penting untuk membedakan situasi dimana harapan atas laporan berbeda dan kapan informasi menjadi tidak relevan.

#### 6. Konteks Keberlanjutan (*Sustainability Context*)

Bagi beberapa pengguna, menempatkan informasi kinerja dalam konteks lingkungan, sosial atau ekonomi yang lebih luas terletak pada inti laporan keberlanjutan dan merupakan salah satu perbedaan kunci antara jenis laporan keberlanjutan dan laporan keuangan. Lebih jauh lagi, karena kemampuan organisasi untuk “berlanjut” itu sendiri jelas sangat penting bagi para *stakeholders*, maka diperlukan suatu bentuk pelaporan bahwa

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



organisasi manapun yakni akan tetap eksis. Prinsip ini menekankan keberlanjutan dalam lingkungan alam dan manusia yang lebih luas dimana perusahaan beroperasi. Karena relevan dan berguna, organisasi pelapor harus memepertimbangkan kinerja individualnya dalam konteks keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini akan melibatkan diskusi mengenai kinerja organisasi dalam konteks batasan dan sosial pada tingkatan makro.

#### 7. Akurasi (*accuracy*)

Prinsip akurasi mengacu pada pencapaian tingkat kepastian dan margin kesalahan yang rendah dalam informasi yang dilaporkan yang diperlukan pengguna dalam membuat keputusan dengan derajat keyakinan yang tinggi. Indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial bisa diungkapkan dalam berbagai cara, mulai dari respon kualitatif terhadap ukuran kualitatif yang rinci. Karakteristik yang menentang akurasi ini bervariasi sesuai sifat informasi. Misalnya, akurasi informasi kualitatif sangat ditentukan oleh kejelasan rinci, dan seimbang dalam penyajian. Akurasi informasi kualitatif, disisi lain tergantung pada metode sampling dalam penyajian. Akurasi informasi kualitatif, di sisi lain tergantung pada metode sampling tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari berbagai unit operasi. Dasar tertentu akurasi yang diperlukan akan tergantung sebagaimana dari tujuan pengguna informasi. Keputusan tertentu akan membutuhkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari informasi yang dilaporkan dibandingkan dengan yang lain.

#### 8. Netralitas (*Neutrality*)

Laporan baru menghindari bias dalam memilih dan menyajikan informasi

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan harus berusaha memberikan penilaian yang seimbang mengenai kinerja organisasi pelapor. Prinsip netralitas mengacu pada kewajaran dan penyajian sesuai fakta mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Melekat dalam prinsip netralisasi ini adalah ide bahwa tujuan inti dibalik pemilihan organisasi pelapor dan komunikasi informasi adalah untuk memberikan gambaran yang tidak bias mengenai kinerjanya.

Artinya dalam menyampaikan pertimbangan yang mencakup hasil yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, bebas dari tujuan tertentu dan pernyataan “*under*” atau “*overstatement*” terhadap kinerja organisasi laporan harus focus pada pemberian fakta yang netral untuk diinterpretasikan pengguna.

Menurut prinsip netralisasi, isi keseluruhan laporan harus menyajikan gambaran yang tidak bias mengenai kinerja organisasi pelapor, menghindari pemilihan, penghilangan atau format penyajian yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna. Karena organisasi pelapor ingin menyajikan sudut pandangnya mengenai suatu aspek kinerja, maka harus jelas bagi pembaca bahwa informasi semacam itu terpisah dan berbeda dari elemen pelaporan GRI.

#### 9. Daya Banding ( *Comparability* )

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial mendukung perbandingan terhadap kinerja organisasi lain. Hal ini memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk membandingkan kinerja dan menilai kemajuan sebagai bagian dari dukungan kegiatan, keputusan investasi, program advokasi dan kegiatan lainnya. Komparabilitas dan permintaan yang terkait dengan konsistensi

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah syarat untuk menginformasikan pengambilan keputusan oleh pengguna.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

10. Kejelasan (*Clarity*)

Organisasi pelapor harus tetap menyadari kebutuhan dari latar belakang kelompok *stakeholders*-nya yang beragam dan harus membuat informasi yang tersedia dengan cara yang responsif terhadap jumlah maksimum pengguna sambil tetap menjaga tingkat rincian yang memadai.

Prinsip kejelasan mempertimbangkan sampai dimana informasi bisa dipahami dan digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Organisasi pelapor melalui penilaian kemampuan *stakeholders*, harus mendesain laporan yang merespon jumlah maksimum pengguna tanpa mengorbankan detail yang penting sekelompok pengguna. Istilah teknis dan ilmiah harus dijelaskan dalam laporan dan jelas, grafik yang sesuai digunakan. Memberikan pada keberhasilan hubungan antara pelapor dan *stakeholders*-nya. Sehingga kejelasan adalah karakteristik penting dari laporan apapun.

11. Ketepatan waktu (*Timeliness*)

Manfaat informasi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial sangat tergantung pada ketepatan waktu keberadaan bagi kelompok pengguna. Ketepatan waktu memungkinkan pengguna mengintegrasikan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya pengungkapan keuangan, laporan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial akan sangat bernilai jika pengguna bisa mengharapkan skedul pengungkapan yang bisa diprediksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

**Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI**

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indikator Kinerja: Ekonomi	
Kategori 1: Ekonomi	
Aspek: Kinerja Ekonomi	
<b>EC1 (Core)</b>	Nilai ekonomi yang dihasilkan: pendapatan, biaya usaha, kompensasi karyawan, donasi dan investasi pada masyarakat, saldo laba dan pembayaran kepada penyedia modal dan pemerintah.
<b>EC2 (Core)</b>	Implikasi perubahan iklim terhadap keuangan, risiko dan kesempatan dalam berusaha.
<b>EC3 (Core)</b>	Cakupan organisasi dalam menetapkan manfaat dari rencana obligasi.
<b>EC4 (Core)</b>	Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah.
Aspek: Keberadaan Pasar	
<b>EC5 (Add)</b>	Rasio tingkat upah awal (standar) dibandingkan dengan upah minimum regional berdasarkan wilayah kerja.
<b>EC6 (Core)</b>	Kebijakan, praktik dan besarnya transaksi pembelian dengan <i>supplier</i> lokal sesuai lokasi kegiatan perusahaan.
<b>EC7 (Core)</b>	Prosedur perekrutan karyawan lokal dan proporsi manajemen senior yang diangkat dari komunitas lokal tempat perusahaan beroperasi.
Aspek: Dampak Ekonomi Langsung	
<b>EC8 (Core)</b>	Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur dan jasa untuk kepentingan publik.
<b>EC9 (Add)</b>	Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak langsung, termasuk besarnya dampak yang terjadi.
Indikator Kinerja: Lingkungan	
Kategori 2 : Lingkungan	
Aspek: Bahan	
<b>EN1 (Core)</b>	Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
<b>EN2 (Core)</b>	Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang ( <i>recycle</i> ).
Aspek: Energi	
<b>EN3 (Core)</b>	Pemakaian energi langsung berdasarkan sumber energi.
<b>EN4 (Core)</b>	Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utamanya.
<b>EN5 (Add)</b>	Penghematan energi karena konservasi dan pengembangan efisiensi.
<b>EN6 (Add)</b>	Usaha untuk menyediakan energi yang efisien atau dapat diperbaharui dalam proses produksi/jasa dan pengurangan pemakaian energi karena penghematan yang dilakukan.
<b>EN7 (Add)</b>	Usaha untuk mengurangi pemakaian energi tidak langsung dan tercapainya target pengurangan.
Aspek: Air	
<b>EN8 (Core)</b>	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
<b>EN9</b>	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh penarikan air.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Add)	
EN10 (Add)	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan lagi.
<b>Aspek: Keanekaragaman Hayati</b>	
EN 11 (Core)	Lokasi dan bisa tanah yang dimiliki, disewa atau dikelola berhadapan langsung dengan area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar area yang dilindungi.
EN12 (Core)	Deskripsi tentang dampak aktivitas, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati di area yang dilindungi dan area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi.
EN13 (Add)	Habitat yang dilindungi dan dijaga.
EN14 (Add)	Strategi, aksi terkini dan rencana kedepan untuk mengelola dampak kegiatan perusahaan pada keanekaragaman hayati.
EN15 (Add)	Jumlah spesies IUCN <i>Red list</i> dan daftar spesies konservasi nasional dengan habitat di daerah yang terpengaruh oleh operasi, dengan tingkat resiko kepunahan.
<b>Aspek: Emisi, Saluran Pembuangan, dan Limbah</b>	
EN16 (Core)	Total emisi gas rumah kaca langsung atau tidak langsung berdasarkan bobot/timbangannya.
EN17 (Core)	Emisi gas rumah kaca lainnya yang relevan berdasarkan bobot/timbangan.
EN18 (Add)	Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan tingkat pengurangan yang dihasilkan.
EN 19 (Core)	Emisi kandungan ozone dan penurunan kandungan berdasarkan bobot/timbangan.
EN20 (Core)	NO, SO dan emisi udara lainnya yang signifikan berdasarkan jenis dan bobotnya
EN21 (Core)	Pembebasan total air berdasarkan kualitas dan tujuan
EN22 (Core)	Total bobot limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN23 (Core)	Total jumlah dan volume buangan yang signifikan.
EN24 (Add)	Berat sampah berbahaya yang dipindah, diimpor, diekspor atau diperlakukan sesuai <i>Basel Convention Annex I, 11, III, dan VIII</i> , dan persentase sampah pindahan yang dikirim internasional dengan kapal.
EN25 (Add)	Identitas, ukuran, status dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati dari dan habitat lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh pembuangan sampah perusahaan.
<b>Aspek: Produk dan Jasa</b>	
EN26 (Core)	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk dan jasa, dan tingkat dampak mitigasi.
EN27 (Core)	Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang diklaim berdasarkan kategori
<b>Aspek: Kepatuhan</b>	
EN28 (Core)	Besarnya denda keuangan dan sanksi lain karena tidak mematuhi peraturan lingkungan.
<b>Aspek: Transportasi</b>	
EN29 (Add)	Pengaruh pemindahan produk dan bahan baku yang digunakan perusahaan dan pemindahan tenaga kerja terhadap kondisi lingkungan.
<b>Aspek: Secara Keseluruhan</b>	

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<b>EN30 (Add)</b>	Total investasi dan pengeluaran lain untuk melindungi/memperbaiki lingkungan berdasarkan jenisnya.
<b>Indikator Kinerja: Sosial</b>	
<b>Kategori 3: Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak</b>	
<b>Aspek: Ketenagakerjaan</b>	
<b>LA1 (Core)</b>	Total tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja dan daerah asal.
<b>LA2 (Core)</b>	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah asal.
<b>LA3 (Add)</b>	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap (full-time) yang tidak diberikan kepada karyawan paruh waktu (part-time) atau sementara berdasarkan kegiatan utama.
<b>Aspek: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b>	
<b>LA4 (Core)</b>	Persentase karyawan yang dilindungi oleh perjanjian kerja.
<b>LA5 (Core)</b>	Periode pemberitahuan minimum berkaitan dengan perubahan kegiatan (operasi), termasuk apakah periode tersebut dimasukkan dalam perjanjian bersama.
<b>Aspek: Kesehatan dan Keamanan Kerja</b>	
<b>LA6 (Add)</b>	Persentase total tenaga kerja yang menjadi wakil dalam komite keselamatan dan kesehatan kerja yang berfungsi membantu dan memberi saran dalam menentukan program keselamatan dan kesehatan kerja.
<b>LA7 (Core)</b>	Statistik kecelakaan kerja, penyakit karena pekerjaan, ketidakhadiran dan jumlah fasilitas yang berhubungan dengan pekerjaan berdasarkan wilayah.
<b>LA8 (Core)</b>	Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan program pengendalian risiko pekerjaan untuk membantu tenaga kerja, keluarga mereka atau anggota masyarakat berkaitan dengan penyakit (wabah) tertentu.
<b>LA9 (Add)</b>	Topik kesehatan dan keselamatan kerja yang dimuat dalam perjanjian resmi (kontrak kerja) dengan serikat pekerja.
<b>Aspek: Pelatihan dan Pendidikan</b>	
<b>LA 10 (Core)</b>	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan jenis/kategori karyawan.
<b>LA 11 (Add)</b>	Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam mengelola akhir karir (pensiun).
<b>LA 12 (Add)</b>	Persentase karyawan yang menerima laporan kineja dan perkembangan karir.
<b>Aspek: Keragaman dan Kesamaan Peluang</b>	
<b>LA13 (Core)</b>	Komposisi pengelola karyawan (governance) dan rincian karyawan per kategori menurut jenis kelamin, kelompok umur, anggota kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lainnya.
<b>LA14 (Core)</b>	Rasio gaji pokok laki-laki dan perempuan berdasarkan kategori karyawan.
<b>Kategori 4: Hak Asasi Manusia</b>	
<b>Aspek: Praktik Investasi dan Perekrutan</b>	
<b>HR1 (Core)</b>	Persentase dan total pedanjaan investasi yang dirancang dengan mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
<b>HR2 (Core)</b>	Persentase <i>supplier</i> dan kontraktor penting yang peduli dan selalu mempertimbangkan isu hak asasi manusia.
<b>HR3 (Add)</b>	Total jam pelatihan pekerja yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang relevan dengan kegiatan kerja termasuk persentase karyawan yang mengikuti pelatihan.
<b>Aspek: Non-diskriminasi</b>	

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>HR4 (Core)</b>	Total kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi dan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi tersebut.
<b>Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berdiskusi</b>	
<b>HR5 (Core)</b>	Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan dalam membentuk kebebasan berserikat dan berdiskusi bersama serta dukungan perusahaan terhadap hal tersebut.
<b>Aspek: Tenaga Kerja Anak</b>	
<b>HR6 (Core)</b>	Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan tindakan/ukuran yang digunakan untuk menghilangkan keberadaan pekerja anak-anak.
<b>Aspek: Tenaga Kerja Wajib dan Paksa</b>	
<b>HR7 (Core)</b>	Kegiatan yang dapat menimbulkan resiko munculnya paksaan/tekanan kepada pekerja dan usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan munculnya kejadian tersebut.
<b>Aspek: Praktik Keamanan</b>	
<b>HR8 (Add)</b>	Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
<b>Aspek: Hak-Hak Dasar</b>	
<b>HR9 (Add)</b>	Total kejadian pelanggaran yang melibatkan hak-hak kaum pribumi (penduduk setempat) dan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengatasinya.
<b>Kategori 5: Masyarakat</b>	
<b>Aspek: Komunitas</b>	
<b>SO1 (Core)</b>	Jenis, lingkup, dan efektifitas program kegiatan yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan pada masyarakat.
<b>Aspek: Korupsi</b>	
<b>SO2 (Core)</b>	Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki potensi korupsi.
<b>SO3 (Core)</b>	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan program anti korupsi.
<b>SO4 (Core)</b>	Tindakan yang dilakukan ketika terjadi kasus korupsi.
<b>Aspek: Kebijakan Publik</b>	
<b>SO5 (Core)</b>	Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi perusahaan dalam pengembangan dan pengaruh kebijakan publik.
<b>SO6 (Add)</b>	Total nilai bantuan keuangan dan kontribusi lain kepada partai politik, politisi dan institusi terkait.
<b>Aspek: Perilaku Anti Persaingan</b>	
<b>SO7 (Add)</b>	Jumlah tindakan hukum untuk perilaku anti persaingan, penentang monopoli industri, dan praktik monopoli beserta hasilnya.
<b>Aspek: Kepatuhan</b>	
<b>SO8 (Core)</b>	Denda keuangan dan sanksi lainnya karena tidak mematuhi peraturan/regulasi yang berlaku.
<b>Kategori 6: Tanggung Jawab Produk</b>	
<b>Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan</b>	
<b>PR1 (Core)</b>	Perbaikan yang dilakukan perusahaan atas dampak kesehatan dan keamanan dari produk/jasa yang dihasilkan perusahaan.
<b>PR2 (Add)</b>	Jumlah ketidakpatuhan perusahaan pada regulasi kesehatan dan keamanan produk yang dihasilkan.
<b>Aspek: Label pada Produk dan Jasa</b>	
<b>PR3 (Core)</b>	Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan dan persentase jumlah produk dan jasa yang mematuhi pengungkapan tersebut.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>PR4 (Add)</b>	Jumlah ketidak patuhan pada regulasi tentang pengungkapan informasi produk dan pemberian label produk/jasa.
<b>PR5 (Add)</b>	Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey yang mengukur kepuasan konsumen.
<b>Aspek: Komunikasi Pemasaran</b>	
<b>PR6 (Core)</b>	Program yang berhubungan dengan aspek hukum, standar komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi dan sponsor.
<b>PR7 (Add)</b>	Jumlah kejadian yang menunjukkan ketidakpatuhan pada regulasi dan aturan lain yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran termasuk iklan, promosi dan sponsor berdasarkan hasilnya.
<b>Aspek: Keleluasaan Pribadi Pelanggan</b>	
<b>PR8 (Add)</b>	Total jumlah keluhan sehubungan dengan hilangnya <i>privacy</i> konsumen dan hilangnya data konsumen.
<b>Aspek: Kepatuhan</b>	
<b>PR9 (Core)</b>	Denda keuangan karena tidak mematuhi peraturan hukum dan regulasi berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan.

Sumber *Global Reporting Initiative (GRI Guidelines G3, 2006)*

Keterangan :

**Core** : indikator inti yang diidentifikasi dalam *GRI Guidelines* sebagai indikator yang menarik perhatian bagi mayoritas *stakeholders* dan diasumsikan material.

**Add** : indikator tambahan yang diidentifikasi dalam *GRI Guidelines* yang mewakili praktik yang muncul atau topik yang mungkin material bagi sebagian organisasi namun tidak bersifat umum.

## 5. Ukuran Perusahaan

Menurut Marwata (2001:160) secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki sumber daya besar dan perusahaan merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar dan publik secara umum. Dengan sumber daya besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dapat dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar.

## 6. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya atas aset yang dipakai perusahaan. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun perputaran modalnya. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan *return of assets* (ROA), *return of equity* (ROE), *net profit margin* (NPM), *operating profit margin* (OPM), *gross profit margin* (GPM), dan *earning per share* (EPS). Para investor dan pemegang saham memperhatikan rasio ini karena ia berkaitan dengan harga saham dan dividen perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas diantaranya adalah gross profit margin atau rasio margin laba kotor yang apabila semakin tinggi margin laba kotor perusahaan menggambarkan kondisi perusahaan yang semakin bagus, karena biaya produksi perusahaan itu rendah. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor semakin tinggi biaya produksi yang ditanggung perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Leverage

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva atau dan yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Tingkat *leverage* terlihat dari besarnya sumber dan hutang yang digunakan perusahaan dalam struktur modalnya. Gitman (2009:62) menjelaskan bahwa posisi hutang perusahaan menunjukkan jumlah uang milik orang lain yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi hutang perusahaan, semakin tinggi risiko perusahaan untuk tidak dapat memenuhi pembayaran hutang kontraktual dan kemudian mengalami kebangkrutan. Rasio *leverage* menunjukkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Hal ini berarti rasio *leverage* menunjukkan kemampuan kekayaan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 8. Tipe Industri

- **Perusahaan *High-profile***

Menurut Utomo dalam Sembiring (2005: 383), perusahaan yang tergolong dalam industri *high-profile* adalah perusahaan yang memiliki consumer visibility, tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat resiko politik yang tinggi atau tingkat kompetensi yang ketat.

Adapun perusahaan yang tergolong dalam industri *high-profile* pada umumnya mempunyai sifat memiliki tenaga kerja yang besar, dalam proses produksinya mengeluarkan limbah cair dan polusi udara. Contoh perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agrobisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan serta transportasi dan pariwisata

- **Perusahaan *Low-profile***

Perusahaan *low-profile* dalam Sembiring (2005: 383) adalah perusahaan yang tidak terlalu memperoleh sorotan luas dari masyarakat jika operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan dalam proses atau hasil produksinya. Bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan high-profile, perusahaan yang dikategorikan dalam *low-profile* lebih toleransi oleh masyarakat luas manakala melakukan kesalahan. Adapun perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri low profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, property, retailer dan produk tekstil, dan produk rumah tangga

## 6. Likuiditas

Pengertian likuiditas dalam messier (2008:177) menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kemampuan memenuhi kewajibannya pada saat ditagih. Rasio yang biasa digunakan untuk mengetahui likuiditas antara lain adalah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio arus kas. Rasio lancar (current ratio) menunjukkan kemampuan likuiditas yang baik. Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio yang memberikan gambaran yang lebih baik mengenai posisi likuiditas jika persediaan menjadi usang atau lamban bergerak. Rasio arus kas operasi adalah rasio yang menggunakan arus kas untuk mengukur likuiditas jangka pendek.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 10. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata memberikan gambaran unik dan hasil yang berbeda - beda yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Fr. Reni Retno Anggraini (2006) berjudul Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta), menunjukkan bahwa persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam pengungkapan informasi sosial.

Penelitian yang dilakukan Eddy R.Sembiring (2005) berjudul Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan , profile, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Martin Gunawan (2009) berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada laporan tahunan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta, menunjukkan bahwa Likuiditas, Profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris dan kepemilikan publik tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Rizkia Anggita Sari (2012) berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa Variabel Tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan lainnya tidak.

**© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**4. Kerangka pemikiran**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti berbagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* , likuiditas dan tipe perusahaan pada tahun 2010-2012. Penetapan rentang waktu dalam penelitian ini didasarkan pada dimulainya implementasi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia bersamaan dengan G3 Guidelines dari Global Reporting Initiative yang diterbitkan pada bulan Oktober 2006. Penelitian ini sebelumnya yang meneliti mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur antara lain adalah Sembiring (2003), Fitriani (2001), Anggraini (2006), Marwata (2001), Muhammad Muslim Utomo(2000)

**1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

Menurut Sembiring (2005:381), variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dijelaskan dengan variable penduga ukuran perusahaan. Publik cenderung memperhatikan perusahaan besar, sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





diukur dengan berbagai proksi antara lain jumlah tenaga kerja, total aset, volume penjualan dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang skalanya besar biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil. (Rizkia Anggita Sari, 2012)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *total assets* sebagai proksi dari ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan. Karena total aktiva perusahaan bernilai milyaran rupiah maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikannya ke dalam logaritma natural.

Maka dengan itu, adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

Penelitian Cooke dalam Fitriani (2001 : 143) yang menunjukkan bahwa kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Tetapi disisi lain, jika likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen (Wallace *et al* dalam Marwata, 2001 : 161).

Bila ditinjau dari *political visibility*, jika terdapat hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan laba, berarti perolehan laba merupakan pendapatan atas pelaksanaan aktivitas sosial oleh perusahaan. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sosial yang lebih luas yang diikuti oleh pembiayaan atas aktivitas tersebut yang sedikit banyak pasti menurunkan pendapatan perusahaan.

Maka dengan itu, adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

#### **3. Pengaruh Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

Fitriany (2001) menyatakan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel sehingga dapat menarik minat dan memperoleh kepercayaan dari *stakeholders*.

Maka dengan itu, adanya pengaruh Likuiditas terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

#### **4. Pengaruh Leverage terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.**

*Leverage* diwakili oleh *Debt to Equity Ratio* (DER). *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai perusahaan. Menurut Schipper dalam Marwata (2001) menyatakan bahwa tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah.

Maka dengan itu, adanya pengaruh Leverage terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Pengaruh Tipe Industri terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Muhammad Muslim Utomo, 2000 dalam Sembiring, 2005: 386 menunjukkan bahwa pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam industri *High-profile* lebih tinggi daripada yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam industri *low-profile*. Hal ini dikarenakan perusahaan dalam industri *high-profile* umumnya memiliki sifat tenaga kerja yang besar, ukuran perusahaan lebih besar, serta konsumen lebih berhati-hati terhadap produk dan layanan perusahaan *high-profile*.

*Corporate Social Responsibility* saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi banyak perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang diterbitkan dan diberlakukan pada 16 Agustus 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan (a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (b) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

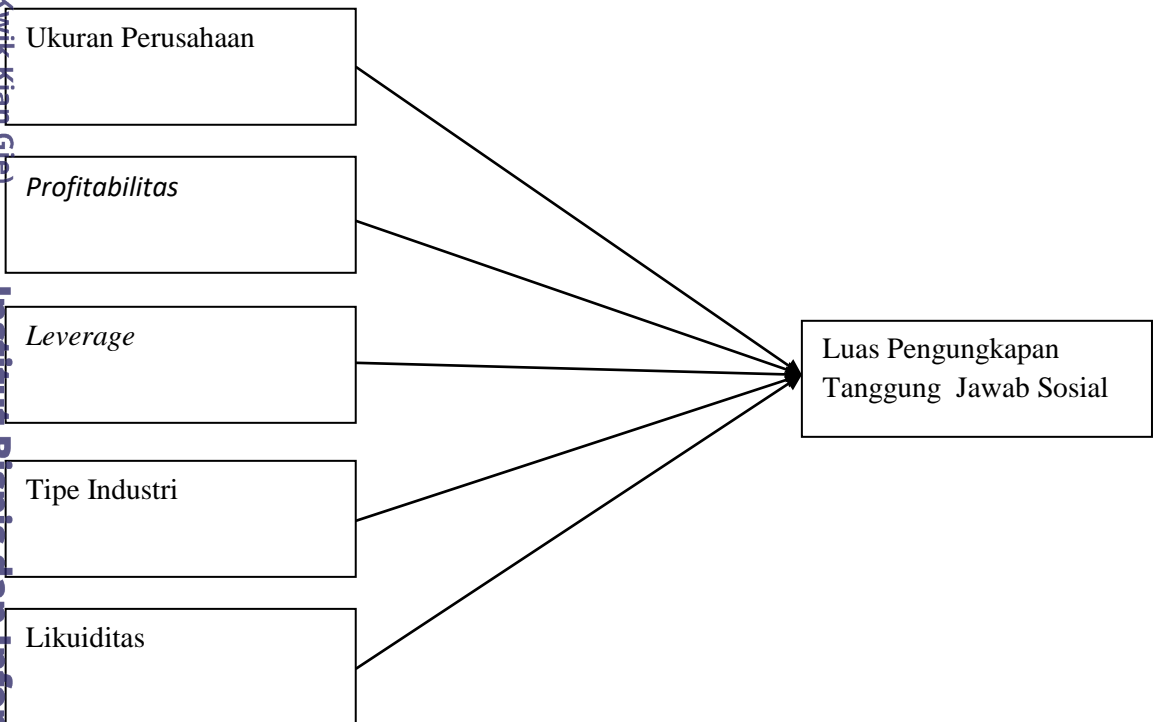
daya alam (*high-profile*) harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Undang-undang ini tidak mewajibkan perusahaan *low-profile* untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Tetapi, penelitian ini ingin melihatkan apakah perbedaan tipe industri tersebut berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Maka dengan itu, adanya pengaruh tipe industri terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Berikut ditampilkan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah

- Ha1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan manufactur.
- Ha2 : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan manufactur.
- Ha3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan manufactur.
- Ha4 : Tipe Industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan manufactur.
- Ha5 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan manufactur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.